

ANALISIS SISTEM DAN PROSEDUR GADAI EMAS SYARIAH

(Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang)

Nadhifatul Kholifah
Topowijono
Devi Farah Azizah
Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Email: nadhifatulkholifah@gmail.com

ABSTRAK

Diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 mengakibatkan perbankan syariah harus menyesuaikan sistem dan prosedur layanan produk gadai emas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem dan prosedur gadai yang berlaku di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah dan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan Bank Indonesia mengenai gadai emas syariah di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Fokus dalam penelitian ini adalah sistem yang terkait dengan layanan produk gadai emas, prosedur yang membentuk sistem, kebijakan Bank Indonesia terkait layanan produk gadai emas, dan kesesuaian sistem dan prosedur dengan kebijakan Bank Indonesia. Terdapat lima sistem dan prosedur yang dilakukan di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah, yaitu prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan seluruh pembiayaan, prosedur pelunasan sebagian pembiayaan, perpanjangan pembiayaan, dan prosedur pelelangan atau penjualan barang jaminan. Terdapat perbedaan tugas dan wewenang dalam melayani gadai di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Malang. Pelaksanaan transaksi gadai emas syariah di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah kantor cabang Malang mengacu pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal produk qardh beragun emas.

Kata kunci : Sistem dan prosedur, Pembiayaan, Gadai emas syariah.

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah telah mengalami perkembangan yang pesat. Secara global pada tahun 1996, sistem keuangan Islam memiliki aset 137 miliar dolar AS dan pada 2011 asetnya berkembang menjadi 1,3 triliun dolar AS. Secara nasional total aset hingga Maret 2012 mencapai Rp 152,3 triliun. Pertumbuhan itu lebih tinggi 40,2% daripada pertumbuhan bank konvensional, yang tumbuh 16,7 persen (Tribunnews.com, 2012). Kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah adalah penyaluran dana, penghimpunan dana, dan produk yang berkaitan dengan jasa kepada masyarakat.

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan di bank syariah. Pembiayaan merupakan kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Terdapat beberapa akad yang digunakan dalam pembiayaan salah satunya adalah akad *rahn* atau gadai. Transaksi gadai diperbolehkan dilakukan di bank syariah dengan barang jaminan berupa emas.

Produk yang termasuk dalam pelayanan jasa ini menjadi salah satu produk yang banyak diminati masyarakat. Hal tersebut dikarenakan emas merupakan produk yang mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan harga emas bisa mencapai 160% setiap lima tahun atau 30% setiap tahunnya. Pelaksanaan *rahn* emas akhir-akhir ini telah menjadi sorotan pengawas perbankan sehingga Bank Indonesia melakukan pembekuan sementara terhadap layanan gadai di beberapa bank syariah. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi praktek spekulasi dan menjaga tujuan gadai emas sebagai alternatif pembiayaan. Untuk menanggulangi hal tersebut, Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 14/7/DPbS tentang *qardh* beragun emas. Surat edaran tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam melaksanakan gadai emas.

Diberlakukannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2013 tentang *qardh* beragun emas ini membatasi besaran pemberian pembiayaan maksimal sebesar

Rp 250.000.000,00 dengan masa perpanjangan pembiayaan maksimal dua kali. Adanya batasan tersebut dan perpanjangan pembiayaan bertujuan untuk mengembalikan fungsi gadai emas yaitu sebagai alternatif pembiayaan berskala mikro.

Layanan gadai yang terdapat pada bank syariah merupakan gadai dengan jaminan emas. Bank yang melayani produk dengan akad *rahn* antara lain PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah. PT. Bank Mega Syariah termasuk dalam salah satu bank umum syariah yang beroperasi di Indonesia. PT. Bank Mega Syariah memulai operasionalnya pada tahun 2004. PT. Bank Mega Syariah merupakan salah satu bank syariah yang lolos dari teguran dari Bank Indonesia walaupun pembiayaan gadai emas di bank Mega mengalami penurunan. Pembiayaan *Qardh* beragun emas hingga akhir bulan September 2012 mencapai Rp 430 milyar. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari akhir tahun 2011 yang sebesar Rp 500 milyar.

PT. Bank BNI Syariah pada mulanya merupakan unit kerja dari Bank Negara Indonesia. Pada tahun 2010, Unit Usaha Syariah BNI ditetapkan sebagai Bank Umum Syariah dengan nama PT. Bank BNI Syariah. PT. Bank BNI Syariah mendapatkan *The Best Practices of Rahn* (disampaikan oleh Subagyo dalam Workshop Gadai dan *Murabahah* Emas pada tanggal 18 April 2012 di Hotel Millenium Jakarta). Hal tersebut diperkuat oleh semakin meningkatnya *outstanding* pembiayaan *rahn* emas di PT. BANK BNI SYARIAH dari 285,56 pada Juni 2011 menjadi 590,44 pada Desember 2011.

PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah melayani jasa Gadai Syariah iB. Masing-masing mempunyai prosedur operasional yang berbeda di antara keduanya. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul **Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah (Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang)**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan sistem dan prosedur gadai emas syariah yang berlaku di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah dan untuk Mengetahui dan menganalisis penerapan kebijakan Bank Indonesia mengenai gadai emas syariah di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Perbankan Syariah

UU No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah menyebutkan “Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.” Pada intinya, bank syariah merupakan bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Perbankan syariah memiliki peranan dan fungsi yang sama dengan perbankan konvensional. Tiga peran dan fungsi tersebut adalah sebagai penghimpun dana, penyalur dana, dan melayani jasa perbankan (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008). Dalam menjalankan kegiatan usahanya perbankan syariah, baik bank umum syariah maupun unit usaha syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Perbankan syariah dalam menjalankan usahanya juga harus memperhatikan prinsip demokrasi ekonomi. Menurut Zulkifli (2007: 13), secara garis besar terdapat dua jenis akad di dalam transaksi yang seringkali terjadi dan diakui secara syariah, yaitu *tabarru'* (kebaikan) dan *tijarah* (perdagangan). Pelaksanaan dalam perbankan syariah terkadang melibatkan beberapa akad dalam satu transaksi. Hal ini diperbolehkan apabila kombinasi terjadi antara akad *tabarru'* dengan *akad tabarru'*, akad *tijarah* dengan *tijarah*, akad *tabarru'* dengan akad *tijarah*. Kombinasi akad *tabarru'* dengan akad *tijarah* memungkinkan salah satu pihak mengambil keuntungan dari pelaksanaan transaksi. Namun keuntungan yang dimaksudkan dalam kombinasi ini adalah pungutan dari proses pemeliharaan atas suatu jaminan (Zulkifli, 2007: 23-24).

2.2 Pembiayaan

Perbankan syariah memiliki konsep alternatif yaitu konsep pembiayaan. Pembiayaan merupakan tempat bernaungnya fungsi kredit dalam perbankan syariah. Pembiayaan dalam konsep bank syariah adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan dana pihak-pihak yang merupakan defisit unit (Ghafur, 2007: 94). Karim (2008: 231-254) mengklasifikasikan pembiayaan bank syariah ke dalam enam jenis, yaitu pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif syariah, pembiayaan sindikasi, Pembiayaan berdasarkan *take over*, dan Pembiayaan *Letter of Credit* (L/C).

2.3 Gadai Syariah (*Rahn*)

Definisi gadai menurut Muhammad (2003: 3) adalah “Salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan

terhadap utangnya itu.” *Rahn* dapat diartikan sebagai perjanjian utang-piutang dengan menggunakan barang tertentu sebagai jaminan dan diperbolehkan adanya imbalan. Sesuai dengan transaksi lembaga keuangan lainnya antara gadai konvensional dan gadai syariah (*Rahn*) memiliki persamaan dan perbedaan. Muhammad (2003: 42) menjelaskan empat perbedaan antara gadai konvensional dan *Rahn*, yaitu *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan; sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak; sedangkan dalam hukum Islam, *Rahn* berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam *Rahn*, menurut hukum Islam tidak ada istilah bunga uang.

Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut perum pegadaian. *Rahn* menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Salah satu transaksi gadai syariah adalah gadai yang menggunakan emas sebagai jaminannya. Transaksi ini dikenal dengan transaksi *Rahn* emas. Radar Bangka Online mendefinisikan gadai emas sebagai berikut “Gadai emas adalah produk bank syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (*qardh*) kepada nasabah dengan jaminan emas (perhiasan/lantakan) dalam sebuah akad gadai (*Rahn*).” Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* Emas adalah sebagai berikut:

- Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN nomor 25/DSN-MUI/III/2002)
- Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahn*)
- Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
- Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Rahn emas merupakan kegiatan pemberian utang dengan akad gadai dalam perbankan syariah dengan jaminan emas yang pada transaksinya dapat dikenakan biaya penyimpanan. Terdapat tiga transaksi yang terjadi dalam pelaksanaan *Rahn* emas, yaitu pinjaman yang diberikan diikat dengan akad *qardh*, penyerahan jaminan emas diikat dengan akad *Rahn* sebagai jaminan atas pinjaman yang telah diberikan, dan atas penyimpanan emas

tersebut diikat dengan akad ijarah atau sewa menyewa (radarbangka.co.id, 2012).

2.4 Sistem dan Prosedur

Salah satu strategi untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas sebuah kegiatan adalah dengan penerapan *Standard Operation Procedure* (SOP). Setiap perusahaan harus memiliki SOP sebagai acuan dan arahan dalam menjalankan kegiatan usaha. Dengan adanya SOP yang baik maka akan menghasilkan sistem dan prosedur yang baik pula. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan (Mulyadi, 2010: 5). Prosedur merupakan urutan kegiatan klerikal atas suatu transaksi yang dilakukan secara berulang-ulang (Mulyadi, 2009: 5). Pelaksanaan sistem dan prosedur dari sebuah kegiatan tidak dapat terlepas dari adanya formulir dan dokumen. Formulir dan dokumen adalah blangko-blangko yang digunakan untuk melakukan pencatatan dari suatu transaksi (Baridwan, 2009: 8).

2.5 Kebijakan Bank Indonesia terkait Gadai Emas Syariah

Bank Indonesia sebagai regulator perbankan di Indonesia termasuk di dalamnya perbankan syariah pada dasarnya memiliki fungsi yang mencakup empat aspek, yaitu perizinan, pengaturan dan ketentuan perbankan, pengawasan, dan pemberian sanksi (Ikhtisar UU No. 21 Tahun 2008). Dalam merumuskan kebijakan mengenai industri perbankan syariah, Bank Indonesia tidak dapat terlepas dari fatwa yang telah dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dikeluarkannya fatwa DSN MUI No 79/DSN-MUI/III/2011 tentang *qardh* dengan nasabah serta mempertimbangkan perkembangan produk *qardh* beragun emas yang semakin pesat sehingga berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah maka Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang *qardh* beragun emas di BUS dan UUS yang tertuang dalam SE BI No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012.

3. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan, menggambarkan, dan melukiskan fenomena mengenai sistem dan prosedur dalam pelaksanaan gadai emas di perbankan syariah. Fenomena tersebut dibandingkan melalui pengambilan sampel pelaksanaan sistem dan prosedur gadai emas pada

dua bank syariah yang berbeda pada periode yang sama.

3.1 Fokus Penelitian

1. Sistem yang terkait dengan layanan produk gadai emas syariah
2. Prosedur yang membentuk sistem dalam layanan produk gadai emas syariah
3. Kebijakan Bank Indonesia terkait layanan produk gadai emas syariah
4. Kesesuaian sistem dan prosedur dengan kebijakan Bank Indonesia, yang meliputi:
 - a. Karakteristik dan fitur dari layanan produk gadai emas syariah
 - b. Prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan layanan produk gadai emas syariah
 - c. Penerapan layanan produk gadai emas syariah.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

1. Pengamatan. Pengamatan dilakukan dengan cara mengamati setiap kegiatan pelayanan jasa gadai emas syariah di kedua tempat penelitian
2. Wawancara. wawancara dilakukan kepada kepala bagian yang menangani pelayanan jasa gadai emas syariah dan nasabah gadai emas syariah. Pada PT. Bank Mega Syariah wawancara dilakukan kepada *Pawn Supervisor*, sedangkan pada PT. Bank BNI Syariah dilakukan kepada Kepala *Customer Service*.
3. Dokumentasi. Dokumentasi ini digunakan sebagai pelengkap data ini antara lain Formulir Permohonan Gadai (FPG) atau Memorandum Pengusulan Pembiayaan, Surat Bukti Gadai, Surat Peringatan, Slip Setoran, dan Berita Acara Eksekusi Barang Jaminan.

3.3 Metode Analisis

1. Menganalisis sistem yang terkait dengan layanan produk gadai emas syariah
2. Menganalisis prosedur yang membentuk sistem dalam layanan produk gadai emas syariah
3. Menganalisis penerapan kebijakan Bank Indonesia terkait dengan produk gadai emas syariah
4. Menganalisis kesesuaian sistem dan prosedur dengan kebijakan Bank Indonesia yang meliputi:
 - a. Menganalisis karakteristik dan fitur produk pembiayaan gadai emas yang dapat dijamin
 - b. Menganalisis prinsip kehati-hatian terkait pelaksanaan sistem dan prosedur

- c. Menganalisis penerapan kebijakan Bank Indonesia dalam prosedur gadai emas syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sistem *Rahn* (Gadai Syariah) Emas di PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Malang

Sasaran gadai emas ini adalah seluruh masyarakat yang membutuhkan dana dan memiliki barang jaminan emas baik berupa logam mulia antam maupun lokal dan/atau perhiasan. Syarat yang harus dipenuhi nasabah di PT. Bank Mega Syariah:

1. Membawa barang jaminan berupa emas.
2. Membawa KTP yang masih berlaku
3. Membawa surat kuasa bermaterai jika barang jaminan bukan merupakan milik calon nasabah
4. Menyetujui persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. Bank Mega Syariah.

Jenis emas yang dapat digadaikan pada PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Malang dapat berupa perhiasan maupun logam mulia. Penaksiran emas di PT. Bank Mega Syariah didasarkan pada Standar Logam Mulia (SLM) SLM yang berlaku di PT. Bank Mega Syariah hingga April 2013 sebagai berikut:

Tabel 2 Standard Logam Mulia (SLM) PT. Bank Mega Syariah

Tingkat Karatase (karat)	Nilai (Rp)
24	459.828
23	440.668
22	421.509
21	402.349
20	383.190
19	364.030
18	344.871
17	325.711
16	306.552
14	268.233

Sumber: Bagian Gadai PT. Bank Mega Syariah Kantor Cabang Malang, 2013

Penilaian barang jaminan di PT. Bank Mega Syariah dilakukan oleh penaksir. Barang jaminan yang akan digadaikan harus ditaksir oleh minimal dua orang penaksir. Penaksir menggunakan timbangan, batu uji, jarum uji, air uji dan tera untuk mengukur berat jenis. Berat jenis diperoleh dari perhitungan berdasarkan rumus berikut:

$$\text{Berat Jenis} = \frac{\text{Berat Kering}}{\text{Berat Kering} - \text{Berat Volume}}$$

Selanjutnya juru taksir menghitung nilai taksiran dengan rumus:

**Nilai Taksiran = SLM berdasarkan tingkat karatase
× berat emas**

Selanjutnya menentukan nilai pembiayaan yang dapat diterima oleh nasabah dengan cara berikut:

Nilai Pembiayaan = 90% × Nilai Taksiran

Besar nilai pembiayaan minimal sebesar Rp 500.000,00. Selain penilaian terhadap emas yang akan digadaikan, penilaian juga dilakukan pada biaya-biaya yang menyertai transaksi ini. Adapun biaya yang dimaksud adalah biaya sewa dan biaya administrasi.

4.2 Prosedur Pemberian Pembiayaan Gadai Emas di PT. Bank Mega Syariah

Pemberian pembiayaan gadai emas di PT. Bank Mega Syariah melibatkan beberapa fungsi, yaitu *pawn appraiser* (juru taksir), *pawn supervisor*, *teller*, dan nasabah. Adapun dokumen yang digunakan adalah *copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) nasabah, Formulir Permohonan Gadai (FPG), Surat Bukti Gadai (SBG), Surat Keputusan Pembiayaan Gadai (SKPG), dan Slip Setoran (SS). Pemberian pembiayaan dilakukan apabila nasabah datang dengan membawa KTP dan *copy* KTP beserta emas untuk kemudian ditaksi oleh juru taksir. Jika nilai pembiayaan memenuhi maka *pawn supervisor* menyetujui pembiayaan dan nasabah dapat mencairkan dana di *teller* dengan membawa SBG. Barang jaminan disimpan dalam gudang oleh pimpinan bidang operasional.

Pelunasan barang jaminan dapat dilakukan dengan melunasi seluruh pembiayaan dan melunasi sebagian pembiayaan. Pelunasan seluruh pembiayaan melibatkan *pawn appraiser*, *pawn supervisor*, *teller* dan nasabah. Formulir yang digunakan adalah KTP/surat kuasa, SBG, SS, dan SKPG. Nasabah datang dengan membawa SBG dan KTP kemudian *pawn appraiser* menghitung total biaya yang harus dibayar dengan menerbitkan SS. Nasabah melakukan pelunasan di *teller* kemudian menyerahkan SS yang telah terdapat tanda lunas pada *pawn appraiser*. *Pawn appraiser* menyerahkan SS kepada *pawn supervisor* untuk mengambil barang di gudang. Barang jaminan kemudian diserahkan kepada nasabah.

Pelunasan sebagian barang jaminan dilakukan dengan cara *pawn appraiser* menghitung barang jaminan yang ingin dilunasi nasabah, nasabah melunasi sebagian pembiayaan di *teller* dengan membawa SS. Nasabah menyerahkan SS kepada *pawn appraiser* kemudian diteruskan kepada *pawn supervisor* untuk mengambil barang. Barang diserahkan kepada nasabah sesuai dengan nilai

yang telah dilunasi. *pawn appraiser* menerbitkan FPG, SBG, dan SKPG baru sesuai dengan nilai barang yang belum dilunasi. Selanjutnya meminta persetujuan kepada *pawn supervisor* dan menyerahkan barang untuk disimpan di gudang.

Pembiayaan yang telah jatuh tempo dapat dilakukan perpanjangan oleh nasabah. *Pawn appraiser* menuliskan kembali taksiran dan nilai pembiayaan pada FPG kemudian mencetak SBG dan SKPG baru. Nasabah hanya diharuskan untuk melunasi biaya sewa pada pembiayaan lama.

Pelelangan barang jaminan dilakukan apabila sampai jatuh tempo dan setelah nasabah diberikan peringatan oleh *pawn supervisor* belum pula melunasi barang jaminannya. Adapun fungsi yang terkait adalah *pawn supervisor*, panitia lelang, *teller*, dan nasabah. Formulir yang digunakan antara lain Surat Peringatan, Slip Pengambilan, Surat Pemberitahuan Eksekusi, dan Berita Acara. *Pawn supervisor* setelah melakukan pemberitahuan dan peringatan kepada nasabah mengenai jaminan yang jatuh tempo namun tidak ada tanggapan berhak melakukan pelelangan. *Pawn supervisor* membentuk panitia lelang kemudian menyerahkan jaminan jatuh tempo kepada panitia lelang untuk ditaksir ulang. Eksekusi barang jaminan dilakukan oleh panitia lelang. Setelah eksekusi panitia lelang menerbitkan berita acara. Jika terdapat kelebihan dari eksekusi jaminan maka menjadi hak pemilik jaminan.

4.3 Sistem Rahn (Gadai Syariah) Emas di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Malang

Sasaran dalam layanan produk ini adalah seluruh masyarakat yang memiliki barang jaminan berupa emas. Masyarakat yang dapat melakukan transaksi gadai harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Membawa barang jaminan berupa emas
2. Membawa KTP/SIM yang masih berlaku
3. Memiliki tabungan di PT. Bank BNI Syariah
4. Menyetujui persyaratan yang telah ditentukan oleh PT. Bank BNI Syariah

Barang yang dapat dijadikan jaminan adalah emas murni (logam mulia) maupun perhiasan yang terbuat dari emas. Namun jaminan perhiasan harus merupakan perhiasan yang telah *existing*, yaitu perhiasan yang pernah digadaikan di PT. Bank BNI Syariah.

Nilai taksiran di PT. Bank BNI Syariah didasarkan pada Harga Dasar Taksiran Emas (HDE) yang ditentukan oleh kantor pusat. Nilai dalam HDE dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan harga pasar emas. Adapun HDE

yang berlaku pada PT. Bank BNI Syariah mulai 5 April 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Harga Dasar Taksiran Emas (HDE) Bank Negara Indonesia per 5 April 2013

Kadar Emas (karat)	HDE (Rp per gram)
24	498.750
23	477.969
22	457.188
20	415.625
18	374.063
16	332.500

Sumber: PT. Bank BNI Syariah Cabang Malang, 2013

Penilaian barang jaminan di PT. Bank BNI Syariah dilakukan oleh juru taksir. Cara yang digunakan untuk menguji jaminan yaitu dengan analisa kimia dan berat jenis. Penilaian barang jaminan dengan analisa kimia menggunakan alat, yaitu batu uji, air penguji, jarum uji emas. Penilaian dengan cara berat jenis menggunakan alat yaitu timbangan elektronik atau analisis lengkap dengan anak timbangannya dari 10 mgr sampai 500 gram, timbangan hidrotastis lengkap dengan anak timbangan dari 10 mgr sampai dengan 500 gram, keler atau tabung yang diisi air bersih, dan tali pengikat yang tidak menyerap air. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai taksiran dengan rumus:

$$\text{Nilai Taksiran} = \text{Berat} \times \text{Tabel Harga HDE}$$

Setelah nilai taksiran diketahui langkah selanjutnya adalah menentukan nilai pembiayaan dengan rumus:

$$\text{Nilai Pembiayaan} = \text{Taksiran} \times 80\%$$

Besar nilai pembiayaan yang dapat diterima adalah sebesar Rp 1.000.000,00. Setelah diketahui besaran pembiayaan yang akan didapatkan oleh nasabah, selanjutnya harus disertakan pula biaya-biaya yang menyertai pembiayaan, yaitu biaya sewa atau biaya titip, biaya administrasi, dan biaya materai.

4.4 Prosedur Pemberian Pembiayaan di PT. Bank BNI Syariah

Fungsi yang terkait dengan prosedur pemberian pembiayaan ini adalah *customer service* sebagai juru taksir, pimpinan bidang operasional, dan nasabah itu sendiri. Adapun formulir yang digunakan adalah Kartu Tanpa Penduduk (KTP)/Surat Ijin Mengemudi (SIM), Buku Rekening, Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP), Surat Bukti Gadai (SBG), dan Akad Pembiayaan (AP). Nasabah datang dengan membawa KTP/SIM dan menunjukkan buku tabungan kepada *customer service* yang melayani pembiayaan gadai. Jika belum memiliki maka nasabah melakukan pembukaan rekening baru. Jika

telah memiliki rekening selanjutnya dilakukan penilaian atas jaminan. Jika nilai telah sesuai maka jaminan disetujui oleh pimpinan bidang operasional. Dana pembiayaan telah dimasukkan ke dalam rekening nasabah. Barang jaminan disimpan dalam gudang.

Pelunasan pembiayaan dapat dilakukan dengan pelunasan seluruh pembiayaan dan pelunasan sebagian pembiayaan. Fungsi yang terkait yaitu *customer service*, *teller*, pimpinan bidang operasional, dan nasabah itu sendiri. Formulir yang digunakan yaitu, Surat Bukti Gadai (SBG), Buku Rekening, dan Slip Setoran (SS). *Customer service* menerima SBG dari nasabah kemudian menghitung biaya yang harus dilunasi nasabah. *Customer service* membuat Slip Setoran dan nasabah melakukan pelunasan di *teller*. Slip Setoran dengan tanda lunas diserahkan ke *customer service* kemudian diteruskan kepada pimpinan bidang operasional untuk mengambil barang. Barang kemudian diserahkan kepada nasabah.

Prosedur pelunasan sebagian barang jaminan dilakukan dengan cara *customer service* melakukan perhitungan atas jaminan yang ingin dilunasi nasabah. Hasil perhitungan ditulis dalam Slip Setoran dan nasabah melakukan pelunasan di *teller*. Slip Setoran digunakan sebagai bukti oleh *customer service* dan diteruskan ke pimpinan bidang operasional untuk mengambil barang. Barang yang telah dilunasi diserahkan kepada nasabah dan barang yang belum dilunasi ditaksir ulang dan diterbitkan MPP serta SBG baru.

Perpanjangan pembiayaan dilakukan sama seperti perlakuan pemberian pembiayaan baru, yakni dengan melakukan taksiran ulang. Jika terjadi kenaikan taksiran maka besarnya biaya penitipan menyesuaikan dengan hasil taksiran yang baru. Apabila hasil taksiran baru lebih besar dari jumlah yang lama dan begitu pula dengan jumlah pembiayaannya maka nasabah dapat meminta tambahan pembiayaan dari selisih antara pembiayaan lama dengan pembiayaan yang baru.

PT. Bank BNI Syariah mengenal istilah pelelangan dengan penjualan. Penjualan barang jaminan dilakukan apabila sampai dengan empat belas hari (dua minggu) setelah jatuh tempo nasabah tidak melunasi atau melakukan perpanjangan pembiayaan. Penjualan barang jaminan dilaksanakan melalui mekanisme lelang secara terbuka maupun dijual dibawah tangan. Fungsi yang terkait adalah pimpinan bidang operasional, panitia lelang, dan *teller*. Formulir yang digunakan antara lain Memorandum Pengusulan Pembiayaan (MPP), Berita Acara

(BA), dan Nota Kredit (NK). Pimpinan Bidang Operasional membentuk panitia lelang. Pimpinan bidang operasional mengeluarkan barang jaminan yang telah lewat masa temponya untuk dilakukan penaksiran ulang. Hasil taksiran baru dituliskan pada MPP. Penjualan barang jaminan dilakukan oleh panitia lelang. Hasil penjualan dicantumkan dalam formulir berupa Berita Acara yang kemudian diserahkan kepada *teller* untuk input data. Jika terdapat kelebihan hasil penjualan ditransfer ke rekening nasabah.

5. Analisis dan Interpretasi

5.1 Sistem dan Prosedur Gadai emas Syariah yang Berlaku di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah.

PT. Bank Mega Syariah telah membentuk bagian yang مخصوص untuk melayani produk gadai emas sedangkan pada PT. Bank BNI Syariah wewenang untuk melayani produk gadai emas dilakukan oleh *customer service*. PT. Bank BNI Syariah perlu membentuk bagian baru dalam struktur organisasinya yang مخصوص untuk melayani produk pembiayaan gadai emas syariah. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menghindari rangkap tugas dan wewenang oleh *customer service*. Adanya bagian gadai yang khusus untuk melayani produk gadai emas akan dapat mempermudah bank dalam melaksanakan sistem dan prosedur gadai emas terlebih dalam kegiatan menaksir emas. Adanya bagian gadai akan dapat lebih meningkatkan kualitas layanan gadai karena karyawan lebih fokus ke perlakuan jaminan emas, terutama dalam hal menaksir emas.

Pembentukan panitia lelang saat jaminan tidak dapat dilunasi oleh nasabah memerlukan karyawan dengan keahlian menaksir emas. Oleh karena itu wewenang yang مخصوص untuk melayani produk gadai emas perlu dialihkan dalam satu bagian khusus. Terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengarsipan formulir. Selain mengarsipkan formulir/dokumen berdasarkan tanggal perlu pula dilakukan pengarsipan yang sesuai dengan nomor dokumen atau nomor formulir. Nomor dokumen dalam formulir yang digunakan sebaiknya telah tercetak oleh sistem sehingga dengan demikian pengeluaran formulir dalam lebih terkontrol.

PT. Bank Mega Syariah tidak mewajibkan nasabah gadai emas untuk memiliki rekening di PT. Bank Mega Syariah. Hal ini berbeda dengan PT. Bank BNI Syariah yang mewajibkan nasabah gadai emas untuk memiliki rekening di PT. Bank BNI Syariah. Dengan adanya keharusan untuk memiliki rekening di bank tempat melakukan gadai

maka pihak bank dapat lebih memantau dana nasabah. Berikut contoh perhitungan pemberian pembiayaan gadai emas.

Nasabah N memiliki emas Logam Mulia (emas murni 24 karat) seberat 15 gram. N ingin menggadaikan emas tersebut. Standard Logam Mulia (SLM) atau Harga Dasar Taksiran Emas (HDE) di PT. Bank Mega Syariah pada saat itu sebesar Rp 459.828,00 dan di PT. Bank BNI Syariah sebesar Rp 498.750,00. Pembiayaan yang dapat diperoleh N adalah sebagai berikut.

- a. Perhitungan Pemberian Pembiayaan di PT. Bank Mega Syariah

$$\begin{aligned}\text{Nilai Taksiran} &= \text{Berat Jaminan} \times \text{SLM} \\ &= 15 \text{ gram} \times \text{Rp } 459.828 \\ &= \text{Rp } 6.897.420,00\end{aligned}$$

Pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah

$$\begin{aligned}\text{Nilai Pembiayaan} &= 90\% \times \text{Nilai Taksiran} \\ &= 90\% \times \text{Rp } 6.897.420 \\ &= \text{Rp } 6.207.678,00\end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan nilai pembiayaan di PT. Bank Mega Syariah maka nasabah memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp 6.207.000,00 setelah dilakukan pembulatan angka ke bawah. Total pembiayaan yang didapatkan nasabah adalah

$$\begin{aligned}\text{Total Pembiayaan} &= 5.985.000 - \text{Biaya Admin} \\ &= 6.207.000 - 15.000\end{aligned}$$

$$\text{Total Pembiayaan} = \text{Rp } 6.192.000,00$$

Jadi dana yang dapat diterima oleh nasabah adalah sebesar Rp 6.192.000,00

- b. Perhitungan Pemberian Pembiayaan di PT. Bank BNI Syariah

$$\begin{aligned}\text{Nilai Taksiran} &= \text{Berat Jaminan} \times \text{SLM} \\ &= 15 \text{ gram} \times \text{Rp } 498.750\end{aligned}$$

$$\text{Nilai Taksiran} = \text{Rp } 7.481.250,00$$

Pembiayaan yang didapatkan oleh nasabah

$$\begin{aligned}\text{Nilai Pembiayaan} &= 80\% \times \text{Nilai Taksiran} \\ &= 80\% \times \text{Rp } 7.481.250\end{aligned}$$

$$\text{Nilai Pembiayaan} = \text{Rp } 5.985.000,00$$

Berdasarkan perhitungan nilai pembiayaan di PT Bank BNI Syariah maka nasabah memiliki nilai pembiayaan sebesar Rp 5.985.000,00. Total pembiayaan yang didapatkan nasabah adalah

$$\begin{aligned}\text{Total Pembiayaan} &= 5.985.000 - \text{Biaya Administrasi} \\ &= 5.985.000 - 10.000\end{aligned}$$

$$\text{Total Pembiayaan} = \text{Rp } 5.975.000,00$$

Jadi dana yang dapat diperoleh nasabah dari menggadaikan logam mulia di PT. Bank BNI Syariah adalah Rp 5.975.000,00.

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dipaparkan diperoleh hasil bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah N akan lebih besar jika dilakukan di PT. Bank Mega Syariah yaitu sebesar Rp 6.192.000,00. Sedangkan jika nasabah N melakukan gadai emas di PT. Bank BNI Syariah maka pembiayaan yang didapatkan sejumlah Rp 5.975.000,00.

5.2 Penerapan Kebijakan Bank Indonesia Mengenai Gadai Emas Syariah

Diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 mengharuskan adanya penyesuaian sistem dan prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur produk *qardh* beragun emas. Karakteristik dan fitur tersebut yaitu:

- Tujuan pembiayaan gadai adalah jangka pendek. Tujuan pembiayaan telah dicantumkan dalam formulir permohonan gadai.
- Gadai emas syariah menggunakan tiga akad yaitu *qardh*, *rahn* dan *ijarah*.
- Tidak menggunakan biaya-biaya lain selain biaya yang telah diperbolehkan menyertai. Biaya yang disertakan dalam layanan gadai emas di PT. Bank Mega Syariah adalah biaya administrasi dan biaya sewa/pemeliharaan. Biaya yang disertakan dalam pemberian pembiayaan di PT. Bank BNI Syariah adalah biaya administrasi dan biaya materai, biaya pemeliharaan.
- Penyertaan biaya penyimpanan dan pemeliharaan baik di PT. Bank Mega Syariah maupun PT. Bank BNI Syariah didasarkan pada berat agunan yang telah terhitung dalam nilai taksiran agunan. Perbedaan terdapat pada dasar persentase yang digunakan oleh kedua bank dalam pengenaan biaya pemeliharaan/biaya penyimpanan.
- Sumber dana untuk pembiayaan gadai emas pada PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah didapatkan dari bagian modal dan keuntungan yang disisihkan.
- Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang sumber dananya berasal dari pihak ketiga dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.
- Pelaksanaan layanan produk gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah memiliki SOP (*Standard Operating Procedure*) tertulis yang digunakan sebagai acuan dalam merumuskan dan menjalankan sistem dan prosedur pelaksanaannya.
- Nasabah baru yang ingin melakukan transaksi gadai wajib menerima informasi mengenai

layanan produk ini. PT. Bank Mega Syariah maupun PT. Bank BNI Syariah telah melaksanakannya. Informasi disampaikan melalui uraian produk PT. Bank BNI Syariah baik di website, brosur, maupun penjelasan dari *customer service* kepada nasabah yang datang.

Pelaksanaan layanan produk gadai emas syariah harus tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, yaitu:

- Dicantumkan tujuan penggunaan dana oleh nasabah pada formulir produk. Pada Formulir Permohonan Gadai (FPG) di PT. Bank Mega Syariah dan pada Memorandum Pengusula Pembiayaan (MPP) di PT. Bank BNI Syariah telah mencantumkan poin mengenai tujuan pembiayaan.
- Emas yang menjadi barang jaminan harus telah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan. Kepemilikan emas yang akan dijadikan jaminan di PT. Bank Mega Syariah adalah dengan nasabah membawa fisik emas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sedangkan di PT. Bank BNI Syariah adalah dengan nasabah membawa fisik emas dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM). Namun dalam pelayanan produk gadai emas di PT. Bank Mega Syariah memfasilitasi nasabah yang ingin memiliki emas namun memiliki dana yang terbatas. PT. Bank Mega Syariah memfasilitasi nasabah dengan nasabah dapat mendatangkan pedagang emas di PT. Bank Mega Syariah. Selanjutnya nasabah membayar emas kepada pedagang sesuai dengan dana yang dimiliki. Selanjutnya emas digadaikan di PT. Bank Mega Syariah sesuai prosedur pemberian pembiayaan atas nama nasabah. Dana yang diterima nasabah diserahkan kepada pedagang untuk melunasi pembelian. Hal ini tidak dianjurkan untuk dilakukan pada layanan gadai emas syariah karena akan menghilangkan tujuan dari gadai emas syariah, yaitu pembiayaan jangka pendek.
- Jumlah portofolio *qardh* beragun emas pada setiap akhir bulan paling banyak adalah jumlah yang lebih kecil antara 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau 150% dari modal bank (untuk bank syariah), dan 20% dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan (untuk unit usaha syariah).
- Pembiayaan maksimal yang dapat diberikan adalah Rp 250.000.000,00 per nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama empat bulan dan dapat diperpanjang paling banyak dua kali. Pembatasan *plafon* baik di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah telah sesuai

dengan SE BI No. 17/DPbS Tanggal 29 Februari 2012 yakni maksimal Rp 250.000.000,00. Begitu pula dengan jangka waktu dikedua bank telah sesuai. Namun perpanjangan pembiayaan di PT. Bank Mega Syariah dapat dilakukan lebih dari dua kali. Hal tersebut tidak dianjurkan karena akan menyimpang dari tujuan awal sebagai pembiayaan jangka pendek.

- e. Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dapat diberikan pembiayaan *qardh* paling banyak sebesar Rp 50.000.000,00 dengan jangka waktu pembiayaan paling lama satu tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Persentase nilai pembiayaan paling banyak sebesar 80% dari rata-rata harga jual emas 100 gram dan harga beli kembali emas PT ANTAM (Persero), Tbk atau menggunakan acuan lain sepanjang persentase nilai pembiayaan yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan persentase nilai pembiayaan yang ditetapkan. PT. Bank Mega Syariah menggunakan acuan persentase nilai pembiayaan 90%. Hal tersebut masih diperbolehkan selama nilai pembiayaan yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan nilai pembiayaan yang ditetapkan. PT. Bank BNI Syariah menggunakan acuan nilai pembiayaan sebesar 80%.

6. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Terdapat lima sistem dan prosedur yang dilakukan dalam layanan produk gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah, yaitu prosedur pemberian pembiayaan, prosedur pelunasan penuh pembiayaan, prosedur pelunasan sebagian pembiayaan, prosedur perpanjangan pembiayaan, dan prosedur lelang jaminan pembiayaan.
2. Terdapat perbedaan fungsi yang terkait dengan pelaksanaan gadai emas di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah. Telah terdapat bagian gadai di PT. Bank Mega Syariah, sedangkan di PT. Bank BNI Syariah layanan gadai masih dilakukan oleh *customer service*.
3. Terdapat perbedaan penentuan nilai pembiayaan bagi nasabah. PT. Bank Mega Syariah menggunakan persentase nilai pembiayaan sebesar 90% dari nilai taksiran barang jaminan sedangkan PT. Bank BNI Syariah menggunakan persentase nilai pembiayaan sebesar 80% dari nilai taksiran.
4. Perpanjangan pembiayaan di PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah telah sesuai

dengan ketentuan Bank Indonesia yakni selama 120 hari. Namun dalam hal perpanjangan, PT. Bank Mega Syariah perlu mengkaji dan menyesuaikan kembali dengan SE BI No 14/DPbS Tanggal 29 Februari 2012 sedangkan PT. Bank BNI Syariah telah melakukan perpanjangan pembiayaan maksimal dua kali.

5. Terdapat dua pelunasan yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk menebus emas yang telah diagunkan yaitu pelunasan penuh dan pelunasan sebagian.
6. Pelelangan atau penjualan agunan/barang jaminan emas dilakukan apabila sampai jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan atas barang jaminannya tersebut.
7. Secara umum PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah telah menyesuaikan sistem dan prosedur gadai emas syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No 14/9/DPbS tanggal 29 Februari 2012.

6.2 Saran

1. Bagi perbankan syariah sebaiknya terdapat pemisahan fungsi dan wewenang antara penaksir dengan *customer service*. Penambahan sumber daya manusia yang bertugas sebagai penaksir diperlukan agar tidak terjadi rangkap fungsi.
2. PT. Bank Mega Syariah dan PT. Bank BNI Syariah telah memiliki standard taksiran logam. Standard ini sangat diperlukan untuk menilai taksiran agunan, namun dalam pelaksanaannya penggunaan nilai STL tersebut tidak pula dapat diprediksi. Sebaiknya kantor pusat menetapkan standard taksiran logam secara berkala dengan masa tertentu. Selain itu diperlukan alat untuk mengetahui nilai emas di pasar agar pada saat penaksir atau bagian gadai memerlukan informasi harga pasar emas dapat langsung mengetahuinya.
3. Diperlukan adanya pengawasan dari pihak bank dan Bank Indonesia secara berkala untuk mengetahui prosedur pelaksanaan gadai emas syariah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Baridwan, Zaki. 2009. *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta:BPFE.
- Ghafur, Muhammad. 2007. *Potret Perbankan Syariah Indonesia Terkini Kajian Kritis Perkembangan Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Biruni Press.

- Karim, Adiwarman. 2004. *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Hadi, Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mulyadi. 2010. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Radar Bangka Online. 28 Oktober 2012. *Gadai Emas, Sudahkah Sesuai Syariah?*. <http://www.radarbangka.co.id/rubrik/pdf/persepktif/3413>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2012.
- Subagyo, Ahmad. Gadai Emas sebagai Solusi Alternatif Pembiayaan Mikro Syariah. Artikel. Disajikan dalam Workshop Gadai dan Murabahah Emas di Hotel Millenium Jakarta Tanggal 18 April 2012. Diselenggarakan oleh Risk Management International, Ltd. Diakses pada tanggal 24 Mei 2012.
- Zulkifli, Sunarto. 2007. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.